



Dana Rp 3 M Terancam

"Hilang"

Untuk Belanja Alkes RS Pratama Seririt

SINGARAJA - Sejumlah alat kesehatan (alkes) untuk penunjang pelayanan di RS Pratama, yang kini dibangun di Desa Tanguwisia, Kecamatan Seririt, terancam gagal dibeli. Dari dana sebesar Rp 7 miliar yang disiapkan untuk pembelian alat kesehatan, hanya sebesar Rp 4 miliar saja yang bisa terserap ■

► Baca *Dana...* Hal 31

**Rp 3 M
Terancam
Kembali
ke Pusat**

■ Pemerintah pusat menyiapkan dana sebesar Rp 7 miliar untuk pengadaan alat kesehatan (Alkes) bagi RS Pratama. Berasal dari dana tugas pembantuan (TP) Kementerian Kesehatan, di samping alokasi dana TP untuk pembangunan rumah sakit tanpa kelas itu.

■ Dari dana Rp 7 miliar yang telah disiapkan, diperkirakan hanya Rp 4 miliar saja yang bisa segera digunakan. Sementara Rp 3 miliar sisanya berpeluang gagal dibeli karena terkendala sistem pengadaan.



Edisi : Jumat, 11 September 2015

Hal : 21



Radar Bali

Sambungan - - -

Kecil, Peluang Pakai yang Rp 3 Miliar

■ DANA...

Sambungan dari hal 21

Sisanya, sebesar Rp 3 miliar terancam "hilang" atau gagal diserap karena terkendala sistem pengadaan.

Sebenarnya pemerintah pusat telah menyiapkan dana sebesar Rp 7 miliar untuk pengadaan alat kesehatan bagi RS Pratama. Dana itu berasal dari dana tugas pembantuan (TP) Kementerian Kesehatan, di samping alokasi dana TP untuk pembangunan rumah sakit tanpa kelas itu.

Hanya saja dari dana Rp 7 miliar yang telah disiapkan, diperkirakan hanya Rp 4 miliar saja yang bisa segera digunakan. Sementara Rp 3 miliar sisanya masih harus menunggu sistem pengadaan. Bahkan, tak menutup kemungkinan alat kesehatan itu gagal dibeli pemerintah karena terkendala sistem pengadaan.

Kepala Dinas Kesehatan Buleleng IGN Mahapramana mengatakan, dana yang bisa digunakan untuk pembelian alat kesehatan, saat ini memang hanya Rp 4 miliar

saja. Dana itu bisa langsung digunakan untuk membeli, karena spesifikasi alat sudah tercantum dalam katalog elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

"Yang Rp 4 miliar itu item-itemnya, harga, dan spesifikasi, sudah adadi e-katalog. Itu ditentukan LKPP langsung. Kalau pemerintah yang beli, harganya *nggak* mungkin lebih atau kurang. Patokan harga dan spesifikasinya sudah ada di sana," kata Mahapramana.

Sementara barang-barang

sisanya, tak tercantum dalam katalog elektronik. Pemerintah pun harus melakukan pengadaan barang dan jasa melalui tender elektronik. Tak menutup kemungkinan alat-alat kesehatan itu sulit dibeli. Apabila dana tak terserap, maka sisa dana sebesar Rp 3 miliar harus dikembalikan ke pemerintah pusat.

Wakil Bupati Buleleng Nyoman Sutjidra yang ditemui terpisah, menyatakan saat ini pemerintah tengah mengupayakan melakukan pengadaan elektronik. Hanya saja

ia tak bisa memastikan apakah tender itu bisa berhasil terlaksana tahun ini, atau sebaliknya terjadi gagal tender.

"Memang waktunya sempit dan peluangnya cukup kecil. Tapi, kami tetap berusaha melakukan pengadaan sesuai

dengan spesifikasi. Karena ada beberapa item tidak ada di katalog, *ya* harus pengadaan. Kalau gagal tender, *ya* kami kembalikan nafti dananya ke (pemerintah) pusat," kata Sutjidra.

Apabila gagal tender, nantinya pemerintah akan berusaha

melakukan pengadaan alat kesehatan serupa, pada tahun 2016 mendatang. Pemerintah akan merancang proposal dengan harapan mendapat dana alokasi khusus (DAK) yang lebih besar untuk pengadaan alkes di RS Pratama. (eps/yes)

Edisi : Jumat, 11 September 2015

Hal : 31